

TEOLOGI POLITIK: SEJARAH, KONTROVERSI, DAN RELEVANSINYA DI DUNIA KONTEMPORER

Naila Dwinanda Oktaviani¹, Deliana Fazra Oktafani², Leilani Azalia Putri³, Ridha Ekayani⁴,
Dadan Firdaus⁵

¹⁻⁵Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: June 2025

Revised: June 2025

Accepted: July 2025

Available online

Korespondensi: Email:

¹nailadwinandaoktaviani@gmail.com

²delianafazra@gmail.com,

³leilaniazalia22@gmail.com,

⁴ekayaniridha@gmail.com,

⁵dadanfirdaus@uinsgd.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Abstrak

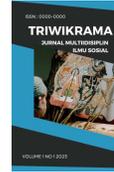
Teologi politik merupakan sebuah kerangka pemikiran yang membahas keterkaitan antara ajaran teologis dan praktik politik dalam pembentukan serta pengelolaan masyarakat. Konsep ini berkembang dari akar historis yang kuat dalam pemikiran para filsuf dan teolog Kristen seperti Santo Agustinus dan Thomas Aquinas, yang menempatkan tatanan ilahi sebagai landasan moral dan struktural bagi kehidupan politik. Di abad ke-20, teologi politik mendapatkan bentuk baru melalui pandangan Carl Schmitt, yang menyoroti keterkaitan antara kedaulatan dan konsep teologis, serta melalui Johannes Baptist Metz yang menekankan pentingnya ingatan akan penderitaan dalam praktik teologi yang politis dan transformatif. Artikel ini membahas empat aspek utama: sejarah perkembangan teologi politik, kontroversi dan kritik terhadap penerapannya, dinamika teologi politik dalam konteks global dan lokal, serta relevansinya terhadap isu-isu sosial kontemporer. Dalam konteks kontemporer, teologi politik menghadapi tantangan besar terkait penyalahgunaan agama dalam politik, munculnya teokrasi yang mengekang

pluralisme, serta kegagalan dalam menjawab kebutuhan masyarakat multikultural dan demokratis. Namun demikian, dalam sejumlah konteks tertentu, teologi politik juga menjadi sumber inspirasi etis dalam perjuangan keadilan sosial dan hak asasi manusia. Dengan pendekatan historis-kritis dan analisis kontekstual, tulisan ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih utuh terhadap potensi dan problematika teologi politik di era globalisasi dan kemajemukan. Artikel ini juga menggarisbawahi perlunya membangun kerangka teologi politik yang inklusif, dialogis, dan relevan dengan tantangan zaman.

Kata Kunci: teologi politik, sejarah pemikiran, kekuasaan dan agama, pluralisme, keadilan sosial, hak asasi manusia

Abstract

Political theology is a conceptual framework that explores the relationship between theological doctrines and political practices in shaping and governing society. It is rooted in a rich intellectual tradition, beginning with Christian thinkers such as Saint Augustine and Thomas Aquinas, who emphasized divine order as the moral and structural foundation of political life. In the 20th century, political theology underwent significant transformation through the ideas of Carl Schmitt—who highlighted the theological underpinnings of sovereignty—and Johannes Baptist Metz, who emphasized the remembrance of suffering as central to a transformative and politically engaged theology. This article discusses four main aspects: the historical development of political theology, its controversies and criticisms, its application in global and local contexts, and its relevance to contemporary social issues. In the



modern era, political theology faces serious challenges, including the misuse of religion in politics, the rise of theocratic tendencies that threaten pluralism, and its failure in some cases to address the needs of multicultural and democratic societies. Nonetheless, in certain contexts, political theology has served as an ethical inspiration in the struggles for social justice and human rights. Through a historical-critical approach and contextual analysis, this paper aims to offer a comprehensive understanding of the potentials and problems of political theology in an age marked by globalization and diversity. It also highlights the need to develop an inclusive, dialogical, and contextually relevant model of political theology for our time..

Keywords: *political theology, history of ideas, religion and power, pluralism, social justice, human rights*

1. PENDAHULUAN

Relasi antara agama dan politik telah menjadi topik diskusi yang intens sejak zaman kuno hingga era modern. Dalam sejarah pemikiran Barat maupun Timur, agama tidak pernah benar-benar terpisah dari urusan kekuasaan dan tata sosial. Salah satu konsep yang lahir dari simpul tersebut adalah teologi politik, sebuah wacana yang mencoba memahami bagaimana gagasan-gagasan teologis membentuk legitimasi kekuasaan, struktur negara, dan peran publik agama dalam masyarakat.

Teologi politik bukanlah konsep yang monolitik, melainkan mengalami transformasi sesuai konteks zamannya. Pemikiran awal Santo Agustinus tentang “Kota Allah” yang mengidealkan tatanan ilahi sebagai rujukan moral-politik, pemikiran Thomas Aquinas tentang hukum ilahi dan natural, hingga formulasi kontroversial Carl Schmitt mengenai “kedaulatan” sebagai bentuk sekularisasi konsep teologis, menandai dinamika panjang dari wacana ini. Sementara itu, Johannes Baptist Metz mengusung bentuk teologi politik baru yang menekankan ingatan akan penderitaan dan tanggung jawab sosial sebagai panggilan iman dalam politik.

Namun, keberadaan teologi politik juga tidak lepas dari kritik. Banyak kalangan mempertanyakan potensi dominasi agama dalam ruang politik yang seharusnya menjunjung kebebasan dan keragaman. Kekhawatiran terhadap munculnya teokrasi, eksklusivisme agama, serta penyalahgunaan wacana keagamaan untuk membungkam oposisi politik menjadi isu sentral dalam perdebatan ini.

Di tengah meningkatnya kompleksitas hubungan antara agama dan negara di berbagai belahan dunia—baik di negara-negara dengan sistem sekuler maupun teokratis—muncul pertanyaan mendasar: apakah teologi politik masih relevan dalam menjawab tantangan zaman? Artikel ini berupaya menjawab pertanyaan tersebut melalui eksplorasi historis, analisis kritis, dan refleksi terhadap konteks global dan lokal, termasuk di Indonesia. Fokus juga diberikan pada bagaimana teologi politik dapat (atau tidak dapat) merespons isu-isu kontemporer seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, pluralisme, dan konflik keagamaan.

2. METODE

Penelitian dalam artikel ini bersifat kualitatif-deskriptif dan menggunakan pendekatan kajian kepustakaan (library research). Tujuan utamanya adalah untuk menelusuri, mengevaluasi, dan mengkonstruksi pemahaman komprehensif mengenai teologi politik dari aspek historis, konseptual, dan kontekstual. Dengan pendekatan ini, penulis berupaya memahami perkembangan teologi politik sebagai disiplin reflektif yang menjembatani antara dimensi iman dan praksis kekuasaan dalam berbagai konteks sosial dan politik.



Sumber data utama terdiri dari literatur primer, yaitu karya-karya klasik dari tokoh-tokoh utama yang berpengaruh dalam pembentukan wacana teologi politik. Di antaranya adalah *De Civitate Dei* karya Santo Agustinus, *Summa Theologica* dari Thomas Aquinas, *Politische Theologie* karya Carl Schmitt, serta karya-karya Johannes Baptist Metz yang merepresentasikan bentuk teologi politik pasca-Holocaust yang lebih progresif dan berbasis memori sosial. Selain itu, digunakan juga literatur sekunder berupa buku, artikel jurnal akademik, dan publikasi ilmiah dari berbagai disiplin yang relevan, seperti teologi, filsafat politik, sosiologi agama, dan ilmu politik. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis isi (content analysis) dan analisis wacana (discourse analysis) untuk mengidentifikasi tema-tema utama seperti hubungan antara agama dan kekuasaan, legitimasi teologis atas negara, serta kritik terhadap teologi politik dari sudut pandang etis, pluralistik, dan demokratis. Penulis menelaah secara kritis bagaimana konsep-konsep tersebut berkembang dalam lintasan sejarah, serta bagaimana mereka diterjemahkan dan diperdebatkan dalam konteks global dan lokal, termasuk dalam diskursus politik Indonesia kontemporer.

Selain menganalisis teks-teks akademik, pendekatan ini juga mempertimbangkan konteks historis dan sosial di balik kemunculan gagasan teologi politik. Untuk itu, penulis menggunakan pendekatan historis-hermeneutik, yang memungkinkan pembacaan teks-teks klasik secara kontekstual dan relevan dengan realitas zaman kini. Agar kajian ini bersifat relevan secara praktis dan teoritis, pendekatan interdisipliner juga diterapkan. Interdisiplinaritas ini diwujudkan dengan menggabungkan kerangka pemikiran dari teologi politik dengan teori-teori sosial-politik kontemporer, seperti teori sekularisasi, pluralisme agama, dan teori keadilan sosial. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya mengulas teologi politik sebagai warisan pemikiran, tetapi juga sebagai wacana yang masih hidup dan berkontribusi terhadap pembentukan ruang publik di era globalisasi dan kemajemukan.

3. HASIL DAN DISKUSI

3.1 Sejarah dan Perkembangan Teologi Politik

3.1.1 Sejarah Singkat

- Zaman Kuno

Pada zaman kuno, terutama di peradaban Mesopotamia, Mesir, India (misalnya dalam Arthashastra), dan Tiongkok (Konfusius), agama dan politik seringkali tidak terpisah. Raja atau pemimpin sering dianggap sebagai perwakilan dewa atau memiliki legitimasi ilahi. Kekuasaan politik dilegitimasi oleh narasi keagamaan, dan hukum seringkali dipandang sebagai titah ilahi.

Di Yunani Kuno, meskipun pemikiran politik mulai berkembang secara formal dengan filsuf seperti Plato dan Aristoteles (melalui karya seperti "Republik" dan "Politik"), elemen keagamaan tetap ada dalam pemahaman mereka tentang masyarakat dan etika. Aristoteles bahkan menyatakan bahwa manusia adalah "makhluk politik," menyiratkan bahwa kehidupan politik adalah bagian intrinsik dari kodrat manusia yang juga memiliki dimensi spiritual.

Di Romawi Kuno, kultus kekaisaran dan pemujaan dewa-dewi Romawi berfungsi sebagai alat untuk memperkuat kesatuan politik dan legitimasi kekaisaran. Para kaisar seringkali diangkat sebagai dewa atau memiliki status semi-ilahi.

Dalam tradisi Ibrani kuno (Perjanjian Lama), terdapat konsep teokrasi, di mana Allah adalah raja dan penguasa tertinggi atas umat Israel. Hukum-hukum yang diberikan kepada Musa dipandang sebagai konstitusi ilahi. Para nabi



seringkali berperan sebagai pengkritik moral dan politik terhadap raja-raja yang menyimpang dari kehendak Allah. Dalam Perjanjian Lama, bisa ditemukan pola pemerintahan yang dijalankan para Nabi, Hakim atau Raja. Sistem itu biasa dikenal dengan teokrasi. Namun baik pemerintahan Nabi, Hakim atau Raja, ketiganya memberi pelajaran bagi kita bahwa tugas pemerintah terhadap rakyatnya dapat kita rangkum dalam empat poin:

1. Memberi kebebasan dari penjajahan dan menjamin rasa aman bagi segenap rakyat. Hal ini dapat kita baca dalam berbagai dalam Hakim-hakim atau kitab Nabi besar maupun kecil.
2. Mengusahakan kebutuhan sehari-hari meskipun mengutamakan dalam lingkungan istana raja. Kisah dalam Keluaran jelas memberi nuansa demikian. Dengan bantuan kemampuan manajerial Yusuf akhirnya Raja bisa menjamin ketersediaan pangan bagi rakyatnya saat musim kering tiba.
3. Menolong masyarakat dalam hubungannya dengan Allah pencipta seperti masyarakat Niniwe. Bahkan kitab Ezra dan Nehemia memberi pengetahuan dan informasi bagi pembaca bahwa transformasi total dalam bangunan infrastruktur kota dan iman orang Israel sedang diusahakan hingga terjadi kebangunan rohani yang besar di tengah orang Israel kala itu.
4. Tak kalah pentingnya baik pemerintahan Nabi, Hakim atau Raja bertanggung jawab dalam menimbulkan rasa patriotisme, cinta tanah air warganya kepada Negara dan pemerintahan yang sedang berkuasa. Seperti melibatkan rakyat dalam pembangunan rumah Allah atau pemilihan Raja.

Perjanjian Baru juga memberikan pelajaran penting tentang pertautan agama (Gereja) dengan politik. Dapat dikatakan gerakan Yesus sebagai double movement: revival dan sosial movement. (Hutahaeen, 2021)

- Abad Pertengahan

Abad Pertengahan di Eropa didominasi oleh pemikiran teologi Kristen, khususnya Gereja Katolik Roma. Hubungan antara gereja (otoritas spiritual) dan negara/kerajaan (otoritas sekuler) menjadi tema sentral teologi politik.

Beberapa tokoh-tokohnya:

- Agustinus dari Hippo (354-430 M)
- Thomas Aquinas (1225-1274 M)

Sepanjang periode ini, sering terjadi konflik kekuasaan antara Paus (sebagai kepala gereja) dan Kaisar (sebagai kepala negara), mencerminkan pergulatan dalam menafsirkan otoritas ilahi dalam tatanan politik.

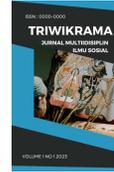
- Reformasi dan Awal Modern

Reformasi Protestan pada abad ke-16 membawa perubahan signifikan dalam teologi politik.

Beberapa tokohnya:

- Martin Luther (1483-1546)
- Yohanes Calvin (1509-1564)

Periode ini juga ditandai dengan munculnya pemikir politik yang mulai mengembangkan teori politik yang lebih sekuler, seperti Niccolò Machiavelli dengan karyanya "Sang Pangeran", yang fokus pada realisme politik dan bagaimana kekuasaan diperoleh dan dipertahankan, terlepas dari pertimbangan moral atau teologis.



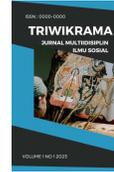
- Era Modern

Era modern ditandai dengan sekularisasi dan munculnya pemikiran pencerahan. Teologi politik mulai beradaptasi dengan konsep-konsep baru seperti kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan demokrasi.

- Pencerahan (abad ke-17 & 18): Filsuf seperti John Locke, Thomas Hobbes, dan Jean-Jacques Rousseau mengembangkan teori kontrak sosial, di mana legitimasi pemerintahan berasal dari persetujuan rakyat, bukan dari hak ilahi raja. Meskipun beberapa pemikir masih mengacu pada hukum alam yang "diciptakan Tuhan," fokus bergeser ke akal budi manusia dan rasionalitas.
- Revolusi dan Konstitusi: Revolusi Amerika dan Prancis menegaskan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, pemisahan kekuasaan, dan kebebasan beragama. Ini mengarah pada model negara sekuler di mana agama dan negara dipisahkan secara kelembagaan.
- Abad ke-20 dan seterusnya: Teologi politik modern berkembang sebagai respons terhadap tantangan sosial, politik, dan ekonomi. Beberapa arah perkembangan meliputi:
 - a. Teologi Pembebasan: Muncul di Amerika Latin, teologi ini menekankan peran agama dalam perjuangan keadilan sosial dan pembebasan dari penindasan struktural. Tokoh seperti Gustavo Gutiérrez menekankan "pilihan preferensial bagi kaum miskin."
 - b. Teologi Politik (Eropa): Tokoh seperti Jürgen Moltmann dan Johann Baptist Metz berusaha merevitalisasi dimensi publik teologi Kristen, menekankan tanggung jawab gereja untuk mengkritik ketidakadilan dan mempromosikan keadilan di dunia. Mereka mengkritik privatisasi agama dan menyerukan keterlibatan Kristen dalam isu-isu politik dan sosial.
 - c. Teologi Politik Islam: Dalam konteks Islam, diskusi tentang hubungan agama dan negara terus berkembang, dari konsep khilafah hingga model negara-bangsa modern, dengan berbagai interpretasi tentang peran syariah dalam pemerintahan.
 - d. Teologi Post-Sekuler: Beberapa pemikir kontemporer mencoba meninjau kembali hubungan antara agama dan politik dalam masyarakat yang semakin sekuler, mengakui bahwa agama tetap memainkan peran penting dalam ruang publik dan membentuk identitas politik.

Gejala di era pasca orde baru, sepertinya orientasi politik pada kekuasaan, bukan lagi pada rezim berkuasa secara monolitik namun pada kelompok-kelompok politik tertentu, yaitu partai politik atau kelompok-kelompok yang berusaha mempengaruhi kebijakan negara yang menggunakan identitas agama dan etnis. (Rantung, 2018)

Secara keseluruhan, perjalanan teologi politik mencerminkan pergeseran paradigma dari sistem yang sangat teokratis di zaman kuno, melalui dominasi gereja di Abad Pertengahan, hingga model sekuler modern yang masih bergulat dengan peran agama dalam ranah publik.



3.1.2 Pemikiran-pemikiran Para Ahli dalam Teologi Politik

- Pemikiran Agustinus

Agustinus dikenal sebagai salah satu Bapa Gereja terbesar yang pemikirannya sangat mempengaruhi Kekristenan Abad Pertengahan. Fokus pemikirannya seringkali melibatkan hubungan antara iman dan akal, serta konsep Kota Allah. Adapun pemikiran Agustinus pada teologi politik berfokus pada konsep "Negara Tuhan" (Civitas Dei) dan "Negara Duniawi" (Civitas Terrestis), dengan menekankan bahwa negara duniawi adalah negara yang sementara dan tidak sempurna, sedangkan negara Tuhan adalah negara yang kekal dan sempurna.

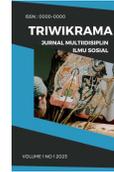
Santo Agustinus membangun konsep dualitas antara "Kota Allah" dan "Kota Dunia" untuk merinci perbedaan mendasar antara kerajaan Allah dan dunia yang berpusat pada kehidupan duniawi. "Kota Allah" digambarkan sebagai komunitas orang-orang yang hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan mengarahkan kehidupan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip iman Kristen. Di dalamnya, moralitas, keadilan, dan ketaatan kepada Tuhan menjadi landasan, dengan fokus pada tujuan akhir, yaitu kehidupan abadi bersama Tuhan. Sebaliknya, "Kota Dunia" merujuk pada masyarakat yang terikat pada hasrat duniawi, pencarian kenikmatan dunia, dan kepentingan duniawi yang bersifat sementara. "Kota Dunia" dipandang oleh Agustinus sebagai entitas yang terfokus pada hal-hal temporal, seperti kekayaan, kehormatan, dan kenikmatan duniawi, tanpa memperhatikan dimensi rohani yang lebih tinggi. (Irawan, Sitanggang, Samsi, dan Pratama, 2024)

"De Trinitate" karya Agustinus terbit untuk menjawab posisinya dalam pertentangan dengan Arianisme dan dualisme dalam filsafat Yunani. Agustinus mengatakan bahwa Allah dalam kekristenan tidak bisa dipahami sebagaimana pada Yunani kuno. Agustinus memahami kebaruan pemahaman tentang Satu Tuhan yang Esa serentak Tritunggal. Allah Trinitas yang diterjemahkan sebagai substansi efektif untuk skema tritesime, tetapi tidak berterima untuk iman Kristiani. Iman Kristiani mengajarkan Satu Allah tiga (3) pribadi (Bapa, Putera dan Roh Kudus). Agustinus menjalankan transformasi internal dari yang lebih lama (metafisika) dan kemudian bergerak ke formulasi yang total baru (teologi wahyu). Bagi Agustinus, tidak ada signifikansi aksiden dalam Tuhan (nihil in eo secundum accidens dicitur), karena tentangNya tidak ada perubahan (quia nihil ei accidit). (Tetiro, 2023)

Agustinus menunjukkan bahwa penulisannya tentang Trinitas ditujukan untuk membangun landasan Kitab Suci mengenai doktrin Trinitas. Agustinus juga bertujuan untuk mengembangkan konsep filosofis terutama dalam hal metafisik dan kosakata yang digunakan ketika hendak berbicara mengenai Allah. (Nassa, 2022)

- Pemikiran Thomas Aquinas

Thomas Aquinas adalah teolog dan filsuf Skolastik yang terkenal dengan usahanya mengintegrasikan filsafat Aristoteles dengan teologi Kristen. Pemikiran Thomas Aquinas dalam teologi politik berfokus pada hubungan antara Tuhan, manusia, dan pemerintahan. Ia percaya bahwa pemerintahan yang adil harus didasarkan pada hukum alam dan kebaikan bersama, serta bahwa raja dan Paus memiliki otoritas yang berbeda namun sama-sama penting dalam mencapai kebahagiaan manusia.



Pengaruh filosofis Aquinas mencakup tradisi Aristotelian yang kuat. Pada masa itu, Aristoteles menjadi kunci untuk pemikiran filosofis dan ilmiah. Aquinas mencoba menggabungkan warisan filsafat Yunani klasik, terutama Aristoteles, dengan teologi Katolik. Penggabungan ini menciptakan suatu sintesis yang menggambarkan upaya untuk menyatukan akal dan iman, filsafat dan teologi (Bugis, Riyanto, dan Jugan, 2024)

Pendidikan Spiritual Aquinas dapat kita pahami melalui tiga penjelasan.

- Pertama, untuk mengetahui, meyakini dan merasakan adanya Allah maka manusia bisa mengoptimalkan akalinya dalam berpikir, bernalar, dan berlogika tentang berbagai macam fenomena yang terjadi di alam raya ini.
- Kedua, Hukum kodrat menunjuk pada kodrat ciptaan. Kodrat adalah apa yang secara hakiki merupakan realitas dan kekhasan suatu ciptaan (identitas). Cara ciptaan itu berada, bergerak, hidup, berkembang, beraksi, berkembang biak ditentukan oleh kodratnya. Kodrat dapat disebut sebagai 'hukum' bagi ciptaan. Ciptaan dalam segala apa dengan sendirinya mengikuti kodratnya. Dan karena kodrat sendiri mencerminkan hukum abadi, kebijaksanaan yang mengadakannya, maka hukum kodrat adalah hukum Ilahi yang dilihat dari sudut ciptaan.
- Ketiga, Aquinas berusaha untuk mensinergikan antara akal (rasional) dengan wahyu (teologi: iman) dalam memperoleh suatu pengetahuan, khususnya pengetahuan akan Tuhan. Ia berpandangan bahwa antara akal dan wahyu tidak ada pertentangan sebenarnya, mereka bisa disatukan dan saling menguatkan. Sehingga, tidak benar bahwa akal bertentangan dengan wahyu atau asumsi lain yang mengatakan akal tidak bisa dijadikan sebagai sumber pengetahuan. (Muvid, 2021)

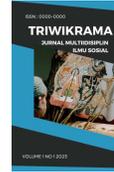
Selanjutnya Aquinas mengatakan, secara teologis bahwa iman lebih tinggi dan berada di luar pemikiran yang berkenaan sifat Tuhan dan alam semesta. Timbulnya pokok persoalan yang aktual dan praktis dari gagasannya adalah pemikirannya dan kepercayaannya telah menemukan kebenaran mutlak yang harus diterima oleh orang lain, penerimaan kebenaran iman bukan karena sekadar yakin, tetapi lebih karena rasio dapat menjelaskannya secara logis kebenaran iman tersebut. Filsafat Aquinas dihubungkan erat sekali dengan teologi. Dengan demikian Aquinas menyimpulkan adanya dua macam pengetahuan yang tidak saling bertentangan, tetapi yang berdiri sendiri-sendiri secara berdampingan, yaitu:

- Pertama, pengetahuan alamiah, yang berpangkal pada akal yang terang serta memiliki hal-hal yang bersifat insani umum sebagai sasarannya.
- Kedua, pengetahuan iman, yang berpangkal dari wahyu dan memiliki kebenaran ilahi. (Taufik, 2020)

- **Pemikiran Jürgen Moltmann**

Ada tiga prinsip utama yang menjadi kunci dalam mengerti metodologi Moltmann.

- Prinsip pertama adalah teologi selalu menjadi teologi publik atau teologi demi Kerajaan Allah. Artinya, teologi tidak hanya memperbincangkan persoalan internal gereja, tetapi bergulat dalam persoalan yang berkaitan dengan hal-hal di luar gereja, seperti masalah sosial, politik, dan budaya.



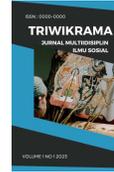
Teologi yang bersifat publik menjadikan dunia sebagai “obyek” berteologi, sehingga masalah-masalah yang terjadi di dunia dianggap sebagai permasalahan yang harus ditanggapi secara teologis. Prinsip ini ingin menunjukkan bahwa teologi memiliki sifat yang bertujuan untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi dalam dunia.

- Prinsip kedua, teologi tidak hanya berorientasi pada praksis tetapi juga dokologi. Dalam dinamika berteologinya, Moltmann berupaya untuk tidak terjatuh pada praksis yang kehilangan sisi keilahian. Menurutnya, teologi yang hanya menekankan praksis akan menjadi teologi yang nihil, jika tanpa unsur memuliakan Allah. Teologinya yang praksis harus didasari atas kesadaran keberadaan Allah dan berakhir pada kemuliaan Allah. Oleh karena itu, penekanan Moltmann pada praksis bersumber dari pemahamannya mengenai ciptaan baru dalam terang eskatologi, yang mana muara dari pengharapan tersebut adalah menikmati Allah dan ikut serta dalam kesukacitaan Allah. Prinsip yang kedua ini merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh Moltmann untuk memberi keseimbangan dalam cara ia berteologi, yakni menyeimbangkan antara praksis dan dasar teologis untuk berpraksis.
- Prinsip ketiga, teologi Moltmann dicirikan dengan keterbukaan pada dialog dengan tradisi yang lain. Moltmann membuka diri untuk belajar dari tradisi di luar tradisi yang sudah dia pahami, baik tradisi yang beragam dalam kekristenan maupun tradisi yang berada di luar kekristenan. Menurutnya, kekayaan tradisi dan banyaknya latar belakang agama Kristen tidak membuat wawasan berteologi menjadi sempit, sebaliknya, keberagaman tersebut memperkaya wawasan berteologi. Oleh sebab itu, dalam berteologi, Moltmann menekankan semangat berdiskusi, berdialog, dan berelasi dengan semua tradisi Kristen di bumi ini sebagai upaya untuk memperluas wawasan dan juga relasi.
- Prinsip keempat dalam metodologi Moltmann adalah teologi yang bersumber dari “pengalaman”. Dalam bukunya yang berjudul “How I Have Changed”, Moltmann menempatkan pengalaman sebagai salah satu prinsip berteologi. Ia mengatakan bahwa teologi tidak terlepas dari pengalaman, baik personal maupun komunal. Melalui pengalaman, setiap individu diberi kebebasan berekspresi dan berpikir mengenai siapa Allah, sehingga teologi itu lahir dari diri sendiri dalam relasinya dengan Allah, baik dalam doa, ratapan, maupun pujian.

- **Pemikiran Carl Schmitt**

Carl Schmitt berpendapat bahwa politik itu inheren bersifat teologis, dengan kata lain, ia melihat bahwa struktur dasar politik dan pemahaman tentang kekuasaan dan kedaulatan dapat ditemukan dalam kerangka teologis.

Pada tahun 1920-an diskusi mengenai Teologi Politik sering diasosiasikan dengan sosok Carl Schmitt. Schmitt adalah seorang ahli politik dan hukum yang dibesarkan dalam keluarga yang memegang teguh ajaran Katolik di Plettenberg, Westphalia. Schmitt dianggap sebagai sosok yang memperkenalkan Teologi Politik Dalam diskusi-diskusi modern. Istilah Teologi Politik itu sendiri muncul pertama kali dalam bukunya yang berjudul *Political Theology: Four Chapters on the*



Concept of Sovereignty. Oleh sebab itu, dia sering disebut sebagai godfather of political theology.

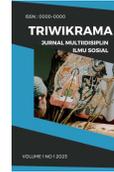
Namun, penggunaan istilah 'Teologi Politik' yang dia maksud sebenarnya tidak banyak berbicara mengenai keagamaan, tetapi sepenuhnya berbicara mengenai filsafat politik. Oleh karena itu, Schmitt lebih sering menyebut Teologi Politik sebagai "sosiologi dari konsep yang berkaitan dengan hukum." Artinya, penekanan Schmitt dalam Teologi Politik, bukan pada teologi tetapi pada politik, karena dasarnya adalah sosiologi. Hasilnya, Teologi Politik yang ia maksudkan lebih banyak berbicara mengenai teori-teori dalam berpolitik.

Konsep teologi politik yang diusung oleh Carl Schmitt atau Saul Newman membuat sebuah pengantar kritis terhadap teologi politik. Perhatian mereka tidak lepas dari berbagai tendensi hingga stigma yang muncul akibat gereja yang berpolitik, dari abad pertengahan hingga zaman postmodern sekarang ini. Setidaknya, peristiwa perang salib menjadi sebuah fakta ironis dari dampak "perkawinan" gereja dan politik yang pernah terjadi. Tidak hanya itu, meningkatnya ketegangan sosial pun terjadi sebagai dampak maraknya politik identitas, yang secara tidak langsung memberikan stigma pada identitas keagamaan. Agama dan kekerasan seolah menjadi dua hal yang saling berdampingan, dan tidak jarang menjadi kendaraan politik kelompok dan golongan tertentu. (Widjaja, Siahaan, dan Nathanael, 2021)

- **Pemikiran Johannes Baptist Metz.**

Johannes Baptist Metz, seorang tokoh utama teologi politik, menekankan pentingnya Memoria Passionis dan keberpihakan kepada korban dalam teologi. Ia melihat penderitaan orang lain sebagai dasar bagi segala klaim kebenaran, termasuk klaim kebenaran teologis. Metz juga menekankan bahwa Gereja harus terlibat dalam perjuangan melawan penindasan dan membangun solidaritas dengan yang tertindas.

Dalam rangka teologi politiknya, Metz pertama-tama bermaksud menunjuk pada kelompok orang, dengannya kita sedang terlibat dalam konflik. Sejarah permusuhan dan pertikaian yang panjang dan melibatkan banyak orang sering tidak lagi memperlihatkan dengan jelas siapa korban dan pelaku. Menyusuri akar pertikaian untuk sampai pada peristiwa awal tidak selalu mudah. Tidak mustahil, kita menemukan pluralitas versi kisah yang sangat kompleks dan membingungkan. Masing-masing kelompok memiliki peran ganda sebagai pelaku dan korban. Mereka mengklaim diri sebagai pihak yang mempunyai alasan cukup untuk menyerang pihak lain, karena haknya telah terlebih dahulu dilecehkan. Karena itu, pertikaian antarnegara atau antarbangsa dan suku hanya dapat diatasi, apabila setiap kelompok tidak hanya melihat dan meratapi penderitaan yang ditimpakan padanya, tetapi bersedia membuka mata untuk melihat pengalaman penderitaan orang lain. Kita mungkin saja memiliki alasan untuk melancarkan serangan. Namun, kalau tindakan itu menimbulkan penderitaan berkepanjangan pada pihak lawan, secara khusus pada mereka yang tidak secara langsung bertanggung jawab atas apa yang menimpa kita, maka serangan itu harus dipertimbangkan kembali atas nama mereka yang sudah dan bakal menderita itu.



Politik yang berbasis kenangan akan penderitaan sendiri akan mudah mengarah kepada pembalasan dendam dan menciptakan lingkaran kekerasan tanpa akhir. Dorongan untuk membalas dendam dan rasa benci bukanlah penasihat yang baik untuk membangun landasan bagi keadilan dan perdamaian. Spiral kekerasan tidak akan dapat dipatahkan apabila orang hanya melihat dan mempertimbangkan penderitaannya sendiri. Melihat melampaui sejarah penderitaan sendiri dan pengalaman sendiri sebagai korban, merupakan bentuk *compassio* yang secara niscaya dibutuhkan dalam dunia yang plural akan tradisi dan versi kisah penderitaan. (Kleden, 2013)

Perspektif Johann Baptist Metz, yang menggarisbawahi hubungan antara iman dengan dimensi ekonomi, sosial, dan politik kehidupan, menyerukan penerapan yang komprehensif di dalam Gereja. Iman tidak terbatas pada ranah spiritual, tetapi harus secara aktif membimbing dan berpartisipasi dalam ranah-ranah ini, karena ranah-ranah ini secara signifikan membentuk pengalaman manusia. Gereja harus berkembang menjadi agen yang inklusif dan proaktif, merangkul individu-individu dari semua lapisan masyarakat dan mengakui bahwa setiap orang adalah subjek dari perawatan dan pengaruhnya. (Firmanto, Setyaningtiyas, dan Romana, 2023)

3.2 Kontroversi dan Kritik terhadap Teologi Politik

3.2.1 Penyalahgunaan Agama dalam Politik

Teologi politik seringkali dikritik karena potensi penyalahgunaan agama untuk kepentingan politik tertentu. Ketika agama digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan, nilai-nilai spiritual dapat terdistorsi demi agenda politik. Hal ini terlihat dalam kasus-kasus di mana pemimpin politik mengklaim dukungan ilahi untuk kebijakan atau tindakan mereka, yang dapat mengarah pada otoritarianisme dan penindasan terhadap kelompok yang berbeda pandangan.

Sebagai contoh, dalam konteks Amerika Serikat, pemerintahan Donald Trump membentuk beberapa entitas terkait agama, seperti White House Faith Office dan Religious Liberty Commission, yang bertujuan untuk meningkatkan kebebasan beragama dan menyelaraskan kebijakan nasional dengan nilai-nilai Kristen konservatif. Namun, kritik muncul karena inisiatif ini dianggap memprioritaskan Kristen konservatif dan mengikis prinsip pemisahan gereja dan negara. (AP News, 2025).

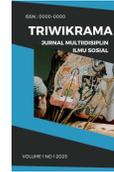
3.2.2 Kekhawatiran terhadap Dominasi Teokrasi

Teokrasi, di mana kekuasaan politik dipegang oleh otoritas keagamaan, menimbulkan kekhawatiran karena dapat mengabaikan pluralisme dan hak-hak individu. Dalam sistem teokratis, hukum dan kebijakan didasarkan pada interpretasi agama tertentu, yang dapat menindas kelompok minoritas dan membatasi kebebasan beragama.

Mario Ferrero (2012) dalam artikelnya "The Rise and Demise of Theocracy: Theory and Some Evidence" menjelaskan bahwa teokrasi seringkali menghadapi masalah efisiensi dan korupsi karena konsentrasi kekuasaan pada otoritas keagamaan yang mungkin tidak kompeten dalam administrasi politik. (Ferrero, M. 2012).

3.2.3 Eksklusivisme Agama dan Dampaknya

Eksklusivisme agama, yaitu keyakinan bahwa hanya satu agama yang benar dan menyelamatkan, dapat menjadi dasar bagi diskriminasi dan konflik sosial. Dalam konteks teologi politik, eksklusivisme dapat mendorong kebijakan yang tidak inklusif dan menolak keberagaman keyakinan.



Brecht (2022) dalam artikel nya "What's the Use of Exclusivism?" mengkritik eksklusivisme soteriologis dalam tradisi Kristen yang menganggap hanya Kristen sebagai jalan keselamatan, yang telah banyak ditinggalkan dalam teologi akademik karena tidak sesuai dengan realitas pluralisme agama. (Brecht, M. 2022).

3.3 Teologi Politik dalam Konteks Global dan Lokal

Teologi politik adalah kajian yang menghubungkan keyakinan agama dengan praktik politik. Dalam konteks global dan lokal, teologi politik berperan penting dalam membentuk identitas, kebijakan, dan interaksi sosial. Materi ini akan membahas berbagai aspek teologi politik, termasuk pengaruh globalisasi, peran negara, keadilan sosial, dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat multikultural.

3.3.1 Teologi Global dan Dampaknya

Globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam cara agama berinteraksi dengan politik. Teologi global mencakup pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai agama dapat diterapkan dalam konteks yang lebih luas, termasuk isu-isu seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan perdamaian. Dalam konteks ini, gereja dan organisasi keagamaan di seluruh dunia berusaha untuk beradaptasi dengan tantangan global sambil tetap mempertahankan identitas lokal mereka. (Tony. S, 2020)

Contoh: Banyak gereja di negara-negara berkembang yang terlibat dalam advokasi hak asasi manusia dan keadilan sosial, menggunakan teologi mereka untuk mendukung perubahan sosial.

3.3.2 Peran Negara dalam Teologi Politik

Teologi politik juga berkaitan dengan bagaimana negara berfungsi dalam konteks global. Negara sering kali menggunakan legitimasi agama untuk memperkuat kekuasaan politiknya. Dalam banyak kasus, pemimpin politik mengaitkan kebijakan mereka dengan nilai-nilai agama untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Ini menciptakan tantangan bagi negara dalam mengelola keragaman agama dan budaya. (Wandi. P, 2024)

Contoh: Di beberapa negara Timur Tengah, hukum syariah menjadi dasar bagi sistem hukum dan pemerintahan, yang menunjukkan bagaimana teologi politik dapat membentuk struktur negara.

3.3.3 Teologi Publik dan Pancasila

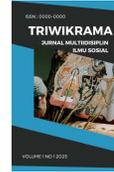
Di Indonesia, teologi publik berperan dalam membentuk ideologi negara. Pancasila sebagai dasar negara mencerminkan nilai-nilai agama dan moral yang diharapkan dapat menyatukan berbagai suku dan agama. Teologi politik di Indonesia menunjukkan bagaimana nilai-nilai agama dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan publik untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. (Stella. Y. E, 2021)

Contoh: Pancasila mengedepankan nilai-nilai ketuhanan yang mencerminkan pluralisme agama di Indonesia, yang menjadi landasan bagi kebijakan publik.

3.3.4 Teologi Lokal dalam Konteks Global

Teologi lokal mencerminkan bagaimana tradisi dan nilai-nilai setempat berinteraksi dengan isu-isu global. Dalam konteks ini, teologi lokal tidak hanya berfungsi untuk mempertahankan identitas budaya, tetapi juga untuk memberikan respon terhadap tantangan global seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan perubahan iklim. Ini menunjukkan pentingnya memahami konteks sosial dan budaya dalam merumuskan teologi. (Johannes. B, 2016)

Contoh: Di Indonesia, banyak gereja yang mengembangkan program-program sosial yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.



3.3.5 Keadilan Sosial dalam Teologi

Teologi kontekstual menekankan pentingnya keadilan sosial dan bagaimana gereja dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil. Dalam menghadapi tantangan global, gereja diharapkan untuk mengambil peran aktif dalam advokasi isu-isu sosial, seperti hak asasi manusia dan keadilan ekonomi. Ini mencerminkan bagaimana teologi dapat menjadi alat untuk perubahan sosial. (Manurung. R, 2021)

Contoh: Banyak organisasi keagamaan yang terlibat dalam program-program bantuan kemanusiaan dan advokasi untuk keadilan sosial.

3.3.6 Tantangan Teologi Politik di Era Modern

1. Radikalisasi: Beberapa kelompok ekstremis menggunakan teologi untuk membenarkan tindakan kekerasan, yang menimbulkan tantangan bagi pemimpin agama untuk mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai damai.
2. Pluralisme: Dalam masyarakat yang semakin plural, teologi politik harus mampu menjembatani perbedaan dan menciptakan dialog antaragama.
3. Perubahan Sosial: Isu-isu seperti perubahan iklim dan ketidakadilan ekonomi memerlukan respons teologis yang relevan dan kontekstual.

Teologi politik dalam konteks global dan lokal menunjukkan interaksi kompleks antara agama dan politik. Dengan memahami dinamika ini, kita dapat lebih baik menghadapi tantangan sosial dan politik yang ada. Teologi politik tidak hanya relevan dalam konteks sejarah, tetapi juga dalam menghadapi isu-isu kontemporer yang memerlukan pendekatan yang inklusif dan dialogis.

3.4 Relevansi Teologi Politik dalam Isu Sosial Kontemporer

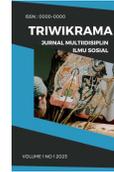
Teologi politik merupakan bidang kajian yang menggabungkan pemahaman keagamaan dengan praktik kekuasaan dalam ruang publik. Menurut Carl Schmitt, teologi politik adalah “konsep-konsep politik yang diubah dari konsep-konsep teologis.” Namun, dalam konteks modern, teologi politik tidak lagi sekadar berbicara tentang legitimasi kekuasaan ilahi dalam negara, tetapi lebih luas: bagaimana nilai-nilai religius berperan dalam membentuk keadaban publik dan menjawab tantangan sosial-kemanusiaan. Di tengah meningkatnya ketimpangan sosial, pelanggaran HAM, konflik keagamaan, dan krisis pluralisme, pendekatan teologi politik memiliki kontribusi signifikan dalam merespons isu-isu tersebut secara konstruktif.

3.4.1 Peran Teologi Politik dalam Mendorong Keadilan Sosial

Keadilan sosial menjadi perhatian utama dalam hampir seluruh tradisi agama. Dalam konteks Kristen, teologi pembebasan (Liberation Theology) yang dicetuskan oleh Gustavo Gutiérrez menekankan bahwa iman Kristen harus berpihak kepada kaum miskin dan tertindas. Ia menyatakan bahwa “kemiskinan adalah skandal moral dan teologi harus menjawabnya dengan tindakan konkret.”

Dalam Islam, keadilan (‘adl) merupakan nilai utama dalam Al-Qur’an yang harus diwujudkan dalam relasi sosial, ekonomi, dan politik. Pemikir seperti Fazlur Rahman dan Asghar Ali Engineer menekankan pentingnya interpretasi sosial atas teks suci untuk mengatasi ketimpangan struktural dalam masyarakat muslim.

Contoh konkret penerapan teologi politik dalam memperjuangkan keadilan sosial dapat dilihat pada keterlibatan tokoh-tokoh agama dalam gerakan reformasi sosial—baik di Amerika Latin, Afrika, hingga Asia Tenggara. Di Indonesia, tokoh seperti KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memadukan etika Islam dengan nilai-nilai hak asasi dan pluralisme dalam memperjuangkan hak minoritas dan masyarakat lemah.



3.4.2 Teologi Politik sebagai Penjaga dan Advokat Hak Asasi Manusia (HAM)

Teologi politik menempatkan manusia sebagai entitas spiritual dan sosial yang hakikatnya dimuliakan oleh Tuhan. Dalam Islam, terdapat prinsip karāmah al-insān (kemuliaan manusia) dalam QS. Al-Isra:70, yang menjadi dasar normatif penghormatan terhadap HAM. Sementara dalam Kekristenan, konsep imago Dei (manusia sebagai citra Allah) menjadi fondasi teologis pengakuan terhadap martabat manusia.

Pada praktiknya, banyak institusi keagamaan berperan aktif dalam membela HAM. Misalnya, dalam konteks apartheid Afrika Selatan, Uskup Desmond Tutu mengerahkan kekuatan Gereja sebagai motor perlawanan terhadap rasisme. Di Amerika Latin, para pastor dan aktivis gereja membela rakyat miskin dari represi militer.

Di Indonesia, ormas Islam seperti Muhammadiyah melalui Majelis Hukum dan HAM-nya aktif mengadvokasi isu-isu perempuan, anak, dan kelompok rentan. Ini menunjukkan bahwa teologi politik dapat berperan sebagai kekuatan korektif terhadap negara yang gagal menjamin hak warganya.

3.4.3 Teologi Politik dalam Mendorong Pluralisme dan Dialog Antaragama

Pluralisme adalah keniscayaan dalam dunia modern. Dalam konteks ini, teologi politik menawarkan pendekatan inklusif yang memungkinkan agama berperan dalam ruang publik tanpa menjadi hegemonik. Pemikir seperti Hans Küng dengan “Project World Ethic” menekankan pentingnya etika global yang melintasi batas agama, dengan dasar nilai-nilai universal seperti kasih, kejujuran, dan keadilan.

Dalam Islam, gagasan pluralisme dikembangkan oleh tokoh seperti Nurcholish Madjid dan Syafii Maarif, yang melihat perbedaan agama sebagai bagian dari kehendak Tuhan, sebagaimana tercermin dalam QS. Al-Hujurat:13 dan QS. Al-Ma'idah:48. Maka, dari sudut pandang teologi politik, keragaman bukan ancaman, melainkan kekayaan spiritual dan sosial yang harus dirawat melalui dialog dan kerja sama.

Contoh praksisnya, berbagai forum lintas iman seperti Interfidei di Yogyakarta, serta inisiatif Gusdurian, merupakan bentuk konkret penerapan teologi politik pluralistik yang menyatukan nilai agama dan semangat kebangsaan.

3.4.4 Teologi Politik sebagai Kritik terhadap Kekerasan dan Konflik Keagamaan

Di banyak negara, konflik keagamaan kerap disulut oleh penggunaan tafsir keagamaan yang eksklusif dan politis. Teologi politik, dalam bentuk yang etis dan kritis, berperan membongkar narasi-narasi kekerasan tersebut. Misalnya, Johan Baptist Metz dalam *Political Theology of the Suffering God* menolak klaim kekuasaan atas nama Tuhan yang menindas, dan menekankan pentingnya solidaritas dengan korban kekerasan.

Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini dapat digunakan untuk menangkal radikalisme agama dengan menawarkan penafsiran yang kontekstual, berorientasi pada perdamaian dan keadilan. Peran tokoh seperti KH. Mustofa Bisri (Gus Mus) dan Prof. Komaruddin Hidayat menjadi contoh bagaimana agama dihadirkan secara lembut dan damai dalam ruang publik yang beragam.

Teologi politik yang damai juga tampak dalam respons komunitas lintas agama dalam tragedi pemboman gereja, masjid, dan rumah ibadah. Respons-respons ini menegaskan bahwa agama, ketika diolah secara reflektif dan etis, bukan sumber kekerasan, melainkan kekuatan rekonsiliatif.



4. KESIMPULAN

Kajian terhadap teologi politik menunjukkan bahwa hubungan antara agama dan kekuasaan bukanlah fenomena baru, melainkan memiliki akar historis yang panjang dan kompleks. Dimulai dari pemikiran Santo Agustinus yang merumuskan dikotomi antara Kota Allah dan Kota Dunia, dilanjutkan dengan pemikiran Thomas Aquinas yang berusaha mensintesis hukum ilahi dan hukum rasional, hingga munculnya refleksi kritis dari tokoh modern seperti Carl Schmitt dan Johannes Baptist Metz, teologi politik terus berkembang sebagai wacana yang mencoba menafsirkan peran agama dalam tata kelola publik dan legitimasi politik.

Namun demikian, teologi politik bukanlah tanpa kontroversi. Di satu sisi, ia memiliki potensi sebagai kekuatan moral yang menuntun pada keadilan dan solidaritas; di sisi lain, ia juga rentan disalahgunakan untuk membenarkan dominasi teokratis, mengeksklusi kelompok lain atas nama iman, atau memanipulasi agama demi kepentingan kekuasaan. Kontroversi ini semakin relevan dalam konteks global dan lokal, di mana masyarakat kini hidup dalam lingkungan yang semakin pluralistik, demokratis, dan terhubung secara global.

Dalam konteks Indonesia dan negara-negara lain, penerapan teologi politik mencerminkan ketegangan antara identitas keagamaan dan prinsip-prinsip kenegaraan yang inklusif. Di sisi lain, teologi politik juga terbukti mampu menjadi landasan etik dalam perjuangan keadilan sosial, pembelaan terhadap hak asasi manusia, dan penyelesaian konflik berbasis agama, jika diolah secara kritis dan inklusif.

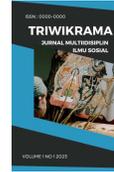
Oleh karena itu, diperlukan pengembangan bentuk teologi politik yang tidak hanya bersifat normatif atau dogmatis, tetapi juga terbuka terhadap dialog, reflektif terhadap sejarah, dan responsif terhadap tantangan kemanusiaan kontemporer. Teologi politik masa kini harus bertransformasi menjadi ruang interaksi antara iman dan keadaban publik, bukan menjadi alat legitimasi dominasi kekuasaan. Sebagai rekomendasi, studi lebih lanjut dapat diarahkan pada analisis empiris mengenai penerapan teologi politik dalam kebijakan publik, wacana hukum, dan aktivisme sosial-keagamaan. Dengan begitu, refleksi teologis tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi turut berkontribusi nyata dalam membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan bermartabat.

5. REFERENSI

- Afsaruddin, Asma. (2015) "Caliphate." *Encyclopaedia Britannica*.
- AP News. (2025, May 20). "Critics say Trump's religious agenda will benefit conservative Christians the most." <https://apnews.com/article/88a9ce8ac81a46fafb7e337366be8e9c>
- Anjum, O. (2024). *Islamic Political Theology* Copyright information. <https://www.saet.ac.uk/Islam/IslamicPoliticalTheology>
- Brecht, M. (2022). "What's the Use of Exclusivism?" *Theological Studies*, 83(1), 30-50. <https://theologicalstudies.net/wp-content/uploads/2022/11/2-Brecht-Use-of-Exclusivism.pdf>
- Bugis, H. A., Riyanto, F. X. A., Jugan, W. (2024). *Allah dalam Perspektif Thomas Aquinas*.
- Burgess, Glenn (1992). *The Divine Right of Kings Reconsidered*. *English Historical Review* 107(425): 837- 861.
- Engineer, A. A. (2001). *Islam and Liberation Theology: Essays on Liberative Elements in Islam*. Sterling Publishers
- Ferrero, M. (2012). "The rise and demise of theocracy": Theory and some evidence. *Public Choice*, 156(3-4), 723-750. <https://doi.org/10.1007/s11127-012-9924-1>



- Firmanto, A. D., Setyaningtiyas, N., Romana, F. (2023). Johann Baptist Metz's Approach to the Church Secularity: A Theology of Connection
- Fox, Jonathan, & Jori Breslawski (2023). State Support for Religion and Government Legitimacy in Christian-Majority Countries. *American Political Science Review* 117(4): 1395-1409 .
- Grzymala-Busse, A. (2019) Beyond War and Contracts: The Medieval and Religious Roots of the European State. Available at: <https://www.annualreviews.org/docserver/fulltext/polisci/23/1/annurev-polisci-050718-032628.pdf?expires=1733857513&id=id&accname=guest&checksum=0341E9E47658490FB90A8BA4FCAA75F8>
- Hidayat, K. (2005). *Agama Masa Depan: Perspektif Filsafat Perennial*. Jakarta: Paramadina
- Hutahaean, H. (2021). *Teologi Politik Gereja: Menemukan dan Memancarkan Tritugas Gereja dalam Pilkada dan Pilpres*
- Irawan, H. D., Sitanggang B. M. T., Samsi, S. N. A., Pratama M. A. (2024). *Keadilan dan Religiusitas Menurut Santo Agustinus*.
- Johannes, B. (2016). Teologi Lokal dalam Konteks Global. *Jurnal Teologi dan Masyarakat*, 4(2), 100-115.
- Kleden, P. B. (2013). *Pandangan Johann Baptist Metz Tentang Politik Perdamaian Berbasis Compassio*.
- Maarif, A. S. (2009). *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*. Jakarta: Mizan.
- Madjid, N. (1992). *Islam, Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*. Jakarta: Paramadina.
- Manurung, R. (2021). Teologi dan Keadilan Sosial: Peran Gereja dalam Merespons. *Jurnal Teologi dan Kemanusiaan*, 6(1), 75-90.
- McQuaid, J.V. (2007) CNA. Available at: https://www.cna.org/archive/CNA_Files/pdf/d0016777.a2.pdf).
- Vaishnaf, M. (2019) The BJP in power: Indian democracy and religious nationalism | Carnegie Endowment for international peace. Available at: <https://carnegieendowment.org/research/2019/04/the-bjp-in-power-indian-democracy-and-religious-nationalism> .
- al-Sayyad, M.S. and Alwadai, S. (2021) Shiite political theology and the crisis of legitimacy in Iran. Available at: <https://rasanah-iiis.org/english/wp-content/uploads/sites/2/2021/11/Shiite-Political-Theology-and-the-Crisis-of-Legitimacy-in-Iran.pdf> .
- Muvid, M. B. (2021). *Pemikiran Thomas Aquinas: Relevansi Pendidikan Spiritual dan Moral Aquinas dengan Pendidikan Islam di Tengah Era Disrupsi*.
- Nassa, G. S. (2022). "TRINITAS DALAM PANDANGAN AGUSTINUS DARI HIPPO": AUGUSTINE'S VIEW OF THE TRINITY.
- Paipais, V. (2020). Political theology: A critical introduction. *Contemporary Political Theory*, 19(S3), 225-229. <https://doi.org/10.1057/s41296-019-00325-z>
- Peter Manley Scott, W. T. C. (2008). *The Blackwell Companion to Political Theology*. Blackwell Publisher.
- Rantung, D. A (2018). *TEOLOGI POLITIK UNTUK KEADILAN: Respons Teologis Gereja di Tengah Menguatnya Politik Identitas*.
- Repository STTAA. Bab Dua: KONSEP TEOLOGI POLITIK JÜRGEN MOLTSMANN.



- Rizky HK, M. (2021). Teologi Politik Islam; Membaca Konstruksi Teologi Politik Hassan Hanafi Dan Abed Al-Jabiri. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 16(1), 143-169. <https://doi.org/10.24042/ajsla.v16i1.8647>
- Rungkat, J., Agama, D., Di Politeknik, K., & Timika, A. (2022). TEOLOGI POLITIK YESUS: SUMBANGSIH MATERI BAGI MATA KULIAH PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DI POLITEKNIK AMAMAPARE TIMIKA. In *Jurnal Sosial dan Teknologi Terapan Amata* (Vol. 01, Issue 1).
- Stella, Y. E. (2021). Teologi Publik Menurut Preman Niles. *Katalog Teologi*, 3(1), 25-40 .
- Taufik, M. (2020). FILSAFAT BARAT ERA SKOLASTIK (Telaah Kritis Pemikiran Thomas Aquinas).
- Tetiro, A. (2023). Tegangan antara Metafisika dan Teologi dalam Pemikiran Agustinus.
- Tony, S. (2020). Berteologi Global Bermisi dalam Konteks. *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, 5(1), 1-15.
- Wandi, P. (2024). Perkembangan Ilmu Negara dalam Konteks Global. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 45-60.
- Widjaja, F. I., Siahaan, H. E. R., Nathanael, O. (2021). Partisipasi Sosial-Politik sebagai Praktik Hospitalitas Kaum Pentakostal Dunamis..